

**PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP
KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT
PADA MASA COVID-19
(Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ROBI
NIM. 160802066**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi
NIM : 160802066
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



ROBI
NIM. 160802066

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT
PADA MASA COVID-19**

**(Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ROBI

NIM . 160802066

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

**PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT
PADA MASA COVID-19
(Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

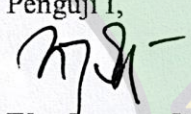
Sekretaris,



Dr. Muji Mulla, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005


Muhammad Thalal, Lc, M.Ed., M.Si.
NIDN. 2019119001

Penguji I,

Penguji II,


Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003


Delfi Suganda, S.H.I., L.L.M
NIP. 198611122015031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2020 lalu juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Besaran BLT yang diberikan kepada masyarakat desa ialah Rp 600.000,00/KPM/bulan selama 3 bulan dengan ketentuan bahwa penerima BLT berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan bantuan bagi masyarakat sehingga BLT yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat lapangan (fieldresearch) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menemukan data yang secara alami sesuai fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Gampong Indra Damai. Masyarakat kurang mampu selaku pihak yang menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut juga merasa sangat terbantu. Adapun faktor pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi program BLT tersebut adalah *pertama* adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Supra Gampong dan *kedua*, Sumber Daya yang memadai dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan faktor penghambat juga terbelai menjadi 2 (dua), yaitu *pertama* adanya tumpang tindih data penerima BLT dengan bantuan sosial lainnya, dan *kedua*, Masih ada masyarakat yang masih belum memiliki NIK yang menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, BLT, Pandemi Covid-19.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
6. Saudara dan teman terdekat peneliti yang juga turut memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang saling bekerjasama dan saling memberi semangat dan dukungan bagi peneliti;
8. Yang teristimewa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu membimbing serta menyertai peneliti dengan do'a dan selalu memberikan semangat, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan

saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh,
Peneliti

ROBI
NIM. 160802066



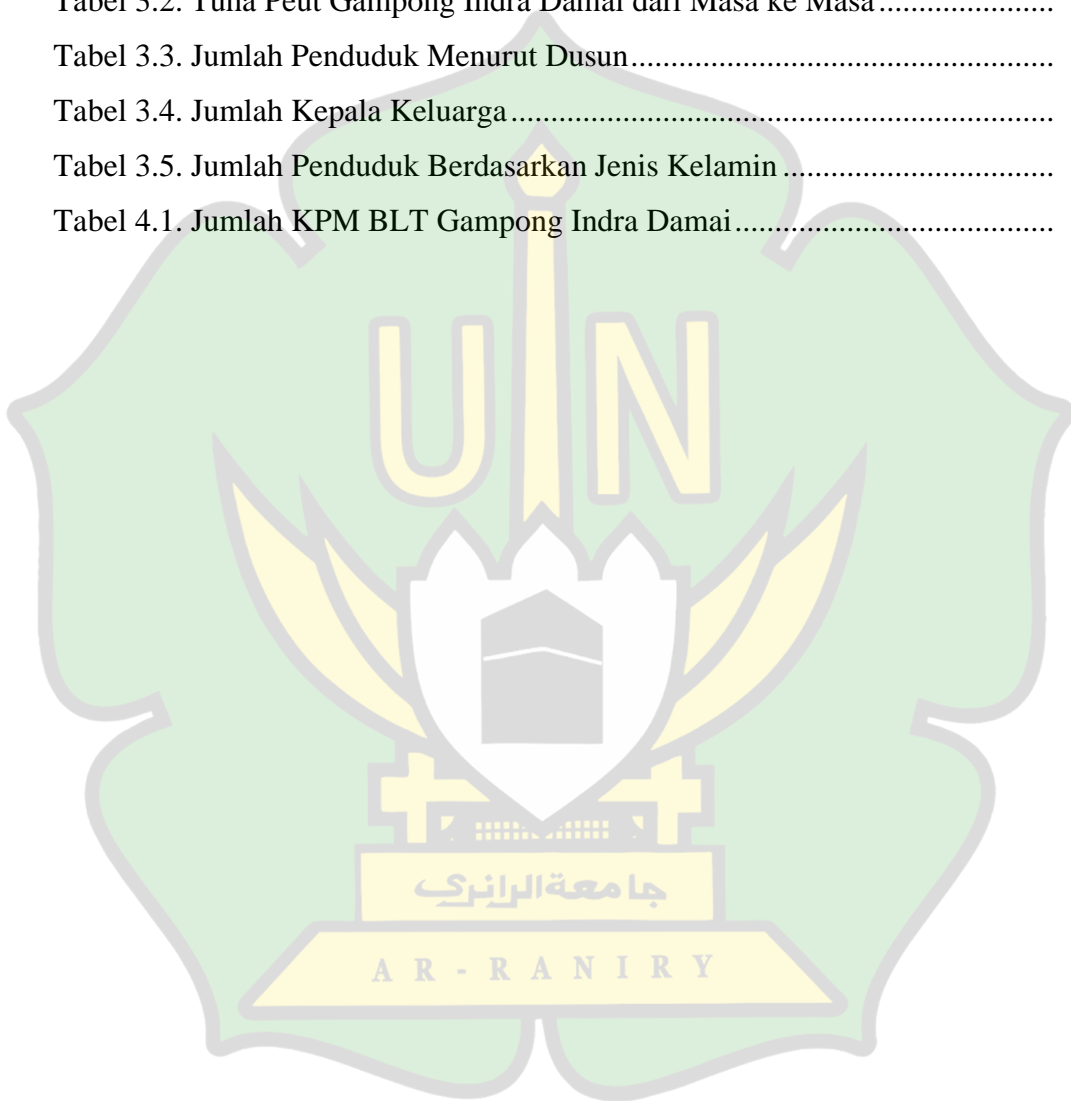
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Teori Implementasi.....	17
2.3. Konsep Kebijakan Publik.....	18
2.4. Implementasi Kebijakan Publik	22
2.5. Bantuan Langsung Tunai.....	24
2.6. Dana Desa.....	27
2.7. Konsep Kelangsungan Hidup	28
2.8. Covid-19	30
2.9. Kerangka Pemikiran	33

BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	35
	3.1. Sejarah Berdirinya Gampong.....	35
	3.2. Sejarah Pemerintah Gampong.....	36
	3.3. Letak Geografis.....	37
	3.4. Sektor Keagamaan	38
	3.5. Sektor Sosial dan Ekonomi.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	4.1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan	42
	4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangung hidup masyarakat di Gampong Indra Damai pada masa Covid-19	47
	4.2.1. Faktor Pendukung	47
	4.2.2. Faktor Penghambat	52
BAB V	PENUTUP	57
	1.1. Kesimpulan.....	57
	1.2. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	DAFTAR LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Infoman Penelitian.....	11
Tabel 3.1. Keuchik Gampong Indra Damai Dari Masa ke Masa.....	36
Tabel 3.2. Tuha Peut Gampong Indra Damai dari Masa ke Masa.....	36
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Dusun.....	37
Tabel 3.4. Jumlah Kepala Keluarga.....	37
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.1. Jumlah KPM BLT Gampong Indra Damai.....	45





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga tanggal 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang (kasus) telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.¹

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya

¹Intan Rakhmayanti Dewi, 2 Tahun Jadi Misteri, Inikah Asal Mula Covid yang Sebenarnya?. Diakses melalui situs: <https://www.cnbcindonesia.com/> pada tanggal 6 April 2023.

gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas.²

Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal.³ (tiga) Pandemi ini telah menyebabkan gangguan pada ekonomi sosial serta banyak negara yang berkurangnya pemasukan, penundaan atau pembatalan kegiatan.

Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Dampak besar yang ditimbulkan akibat pandemi yakni menurunnya pendapatan masyarakat, dimana negara membatasi untuk melakukan kegiatan dengan cara: pekerja dirumahkan bahkan sampai di-PHK, para petani tidak dapat menjual hasil kebun karena berkurangnya pembeli, para sopir angkut tidak ada lagi penumpang, dan lain

²*Ibid.*

³Penulis Nur Fitriatus Shalihah, Hari Ini dalam Sejarah: WHO Resmi Menamai Penyakit Covid-19. Diakses melalui situs: baca: <https://www.kompas.com/> pada tanggal 6 April 2023.

sebagainya.⁴ Itulah beberapa dampak yang mengakibatkan melemahnya akses ekonomi. Maka dari itu untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah memberikan segala bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi antara lain Kartu Prakerja, PKH, BLT, bantuan pulsa listrik, bantuan UMKM dan bantuan pegawai swasta.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2020 lalu juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Walaupun di tengah pandemi Covid-19, pemerintah senantiasa menerapkan langkah-langkah baru untuk menangani serta mencegah semakin bertambahnya jumlah penduduk yang terkena dampak baik dari bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Seperti diketahui, akibat dari pandemi ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat adanya kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yang mengakibatkan kestabilan ekonomi terganggu. Para pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah tidak ada pemasukan dan tidak

⁴Kementerian Keuangan RI, Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

dapat membeli kebutuhan sehari-hari sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi secara nasional.

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan telah menetapkan Kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka penanganan COVID-19 bagi masyarakat desa yang dananya bersumber dari Dana Desa. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan PMK 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dimana terjadi perubahan prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya menjadi pemberian BLT Desa.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Besaran BLT yang diberikan kepada masyarakat desa ialah Rp 600.000,00/KPM/bulan selama 3 bulan dengan ketentuan bahwa penerima BLT berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan bantuan bagi masyarakat sehingga BLT yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran.⁵

BLT Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

⁵Kementerian Sosial RI, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Diakses melalui situs: <https://kemensos.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperpanjang masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari bulan April Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020, menjadi dasar implementatif Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin.

Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda, yaitu berkisar antara 25 sampai 35 persen, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Apabila Desa dengan pagu anggaran di atas Rp 1,2 miliar, maka mendapat alokasi sebanyak 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah daerah.

Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan merupakan salah satu gampong di Provinsi Aceh, Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat

pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat di gampong ini memiliki pekerjaan petani, PNS, Pedagang dan lain-lain. Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) bagi masyarakat miskin terdampak covid-19. Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan. Walaupun demikian, amatan penulis di lapangan, ada beberapa masalah yang dialami masyarakat, seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima bantuan tersebut dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji secara mendalam terkait dengan penelitian ini sehingga peneliti dapat menemukan jawaban secara komprehensif dan tersusun yang dikemas dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Pada Masa Covid-19(Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

Virus Corona yang menyebar pada awal tahun 2020 mengakibatkan banyak masalah yang terjadi bukan hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada faktor ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat.

Implementasi dan dampak BLT terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa Covid-19.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap kelangsung hidup masyarakat di Gampong Indra Damai pada masa Covid-19?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap kelangsung hidup masyarakat di Gampong Indra Damai pada masa Covid-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mengenai implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa

Covid-19 di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial/pemerintahan tentang implementasi program BLT terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa covid-19.

2. Manfaat Praktis

Dapat memperluas wawasan dan referensi bagi Kecamatan Kluet Selatan sebagai pedoman tolak ukur dalam mengetahui implementasi program BLT terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa covid-19 serta dapat dijadikan referensi tambahan kepada pembaca lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai setiap istilah yang dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Implementasi.

Secara umum istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke

dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.⁶ Jadi, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin, untuk membantu mereka dalam kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.⁷ Jadi, BLT berupa uang tunai yang diberi kepada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, BLT dibagikan kepada rumah tangga sasaran dalam kurun waktu tiga bulan sebesar Rp.600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000.

3. Covid-19.

Coronavirus Disease 2019 atau (Covid-19) adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 182.

⁷Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 48.

biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).⁸ Jadi, Covid-19 adalah penyakit yang masih sangat baru. Diduga cara penyebaran utama penyakit ini adalah melalui droplet saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa Covid-19 di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan.

Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai lisan maupun tertulis, hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung.⁹ Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat lapangan (*fieldresearch*) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menemukan data yang secara alami sesuai fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian.¹⁰

⁸Kementerian Keuangan RI, Sekilas Pandang Mengenai Virus Baru, Covid-19. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

⁹ John W. Best, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Terj.Sampai Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso), (Surabaya: Nasional, 1992), hlm. 116.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung Alfabeta, 2010), hlm. 8.

1.7.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil datanya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh suatu data.¹¹ Penelitian cenderung memilih teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹² Peneliti memilih teknik *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan. Untuk menjawab penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak sembilan belas (6) orang. Jumlah ini dipandang cukup untuk menjawab persoalan yang sedang peneliti kaji. Sedangkan alasan penulis menentukan narasumber tersebut agar dapat menemukan jawaban dari penelitian ini. Berikut penulis buat dalam bentuk Tabel

Tabel. 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.		Keuchik
2.		Aparatur Gampong
3.		Tokoh masyarakat

¹¹ Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 165.

¹² Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 124.

4.		Penerima BLT
5.		Penerima BLT
6.		Penerima BLT

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam tulisan ini yaitu Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Alasan penulis menetapkan Gampong Indra Damai sebagai lokasi penelitian yaitu penulis ingin melihat sejauh mana pemerintah gampong melaksanakan penyaluran dana BLT sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu/miskin yang terdampak covid-19 dari segi ekonomi. Yang ingin penulis lihat adalah bagaimana implementasinya dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses penyaluran dana BLT tersebut kepada masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview), adalah proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek) yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.¹³ Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur,

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...*, hlm. 233-234

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (Seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai bentuk keabsahan atau kebenaran dari teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan secara nyata pada para informan yang bersangkutan.

1.7.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable variable yang ada.¹⁴ Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 26.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini,

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Latifah, Mahasiswa Program Studi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap pelaku usaha kecil menengah pada masa Covid-19 di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”, menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat membantu sektor ekonomi masyarakat para pelaku usaha kecil menengah tersebut serta bisa mendongkrak kembali perekonomian pelaku usaha kecil menengah yang anjlok di masa pandemi. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa masa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap kerentanan pelaku usaha kecil menengah dan dari data wawancara dengan pedagang pelaku usaha terlihat bahwa program BLT telah berhasil untuk meringankan beban bagi pelaku usaha kecil menengah dalam masa pandemi Covid-19.¹⁵

¹⁵Nurul Latifah. 2021.*Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap pelaku usaha kecil menengah pada masa Covid-19 di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar*. Program Studi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Nabillah Putri, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul, “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” menjelaskan bahwa, implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam ketahanan ekonomi keluarga di desa Jatimulyo belum cukup menyeluruh dapat mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat. Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan observasi, masih banyak nya masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Dimana untuk memulai usaha demi mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masih banyak yang tidak melakukannya. Seperti contoh membuka usaha. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam *sidiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), dan *amanah* (dapat dipercaya).¹⁶
3. Jurnal yang disusun oleh Ika Agustina dan Asep Hendra, mahasiswa program studi Ekonomi dan Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang berjudul,

¹⁶ Diana Nabillah Putri. 2022. *Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pemberian BLT Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur Kecamatan, Jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/ RT, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, ada beberapa warga Masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan, tetapi tidak dapat, hal ini dikarenakan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Jajaran Aparatur Desa, akan segera memperbaiki data- data yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian data dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. pengawasan dilakukan oleh pihak TNI, POLRI dan SATPOL PP.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti belum menemukan penelitian ini pada cabang Ilmu Administrasi Negara, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat Pada masa covid-19 (Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan), untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah pada cabang Ilmu Administrasi negara.

¹⁷ Agustina, Ika dan Hendra, Asep. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8, No. 2, Desember 2021. 132-144.

2.2. Teori Implementasi

Menurut Syaukani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, menjelaskan, implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang

¹⁸ Syaukani, dkk., *Otonomi Dalam Kesatuan*, (Yogyakarta: Yogya Pustaka, 2004), hlm. 295.

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁹

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²⁰ Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2.3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Artinya, kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan sehingga memiliki bagian terpenting, karena

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 65.

²⁰ I Nyoman Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 79.

bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Solichin Abdul Wahab, istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:²¹

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Irfan Islamy, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40.

pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup atura-naturan yang ada didalamnya.²² Tidak hanya itu, Islamy juga mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²³

Konsep kebijakan tersebut dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.²⁴

Sementara itu, secara terminologikebijakan publik (*public policy*) itu memiliki arti sangat banyak, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.²⁵ Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang

²² M. IrfanIslamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

²³ *Ibid*, hlm. 17.

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta: MediaPressindo, 2007), hlm. 18.

²⁵ David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, (New York: Knopf, 1953), hlm. 178.

terarah.²⁶ Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²⁷ Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.²⁸

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:²⁹

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Jadi, kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

²⁶Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, (New Haven: Yale University Press, 1970), hlm. 88-89.

²⁷Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 17.

²⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 6.

²⁹Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 22.

2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan.

Bangsa Indonesia terkenal hebat dalam membuat konsep. Salah satu konsep dimasa lalu yang terkenal adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dimana kalangan pengkritisi kebijakan publik sering memplesetkan GBHN dari kepanjangannya menjadi Gagasan Besar Hasilnya Nol, hal ini tidak perlu membuat pemerintah menjadi geram, tetapi perlu dilihat sebagai salah satu indikator yang menunjukkan *something wrong* dalam implementasi kebijakan. Selain GBHN, konsep yang dibuat oleh Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, Nasakom adalah dokumen-dokumen kebijakan yang dibuat bangsa Indonesia dalam bentuk konsep yang mendekati sempurna. Pancasila begitu terkenal di mancanegara dan diakui oleh banyak negara sebagai filsafat terbaik yang dibuat bangsa Indonesia, namun yang menjadi keprihatinan adalah banyak negara-negara lain yang tidak menganut ideologi Pancasila lebih ‘berpancasila’ dari pada bangsa Indonesia sendiri.³⁰

³⁰Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2018), hlm. 28.

Implementasi kebijakan banyak memerlukan tenaga kerjamaupun kemampuan organisasional dari apa yang telah ada. Berdasarkan keadaan ini, implementasi kebijakan adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Implementasi mungkin dapat dipandang sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya, dengan demikian implementasi menjadi suatu jaringan yang tidak tampak, tetapi memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Masalah yang penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah, bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik didalam lingkup lembaganya.³¹

Untuk merumuskan masalah tersebut, karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagaibagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar

³¹*Ibid.*

sekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.³²

Sehubungan dengan hal ini, maka peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya. Idealnya, keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan tidaklah semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan atau ukuran efisien, prinsip-prinsip ekonomi dan administrasi, akan tetapi harus pula didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan etika dan moral.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Dan hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat.

2.5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pandemi Covid-19 membawa berbagai macam dampak pada masyarakat. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Ekonomi mengalami hambatan, bahkan adanya himbuan untuk *social distancing*, dimana menyebabkan roda perekonomian di masyarakat mengalami penurunan. Pada sisi

³²Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006), hlm. 13-14.

lainnya, daya beli masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Situasi ini memunculkan berbagai macam kebijakan jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.

BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk yang terdampak pandemi Covid-19 atau memiliki penyakit kronis yang ada di pedesaan yang bersumber dari Dana Desa. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masyarakat adalah Rp. 600.000,00 perbulan/keluarga selama bulan April sampai Juni. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi Covid-19.³³

Pada program BLT-Dana Desa memiliki sasaran penduduk miskin yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja. Diharapkan penerima BLT-Dana Desa tepat sasaran dan tidak ada yang memperlakukan dana tersebut. Dan bagi penerima manfaat BLT-Dana Desa dapat terbantu kehidupan ekonominya.

Dalam PMK Nomor 40 tahun 2020, BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid-19. BLT

³³ Putri Windarti, Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muara Jalai, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022, hlm. 19.

Desa ini adalah program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya.

BLT merupakan progam kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (nearpoor), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, mengharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.³⁴

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Jadi, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Program bantuan ini berupa

³⁴*Ibid*, hlm. 20.

uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

2.6. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 60 tahun 2014). Beberapa pasal di PP Nomor 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi seluruh Indonesia. Tentu saja turunnya dana desa sebesar itu diharapkan akan dapat mendorong desa untuk dapat melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik. Setelah hampir beberapa tahun dana desa berjalan, sejumlah desa diketahui telah mulai mampu mengubah diri, khususnya bagi desa-desa yang berhasil memanfaatkan dana relatif besar untuk melakukan sejumlah langkah inovatif guna

mempercepat dan mengefektifkan penggunaan dana desa, termasuk untuk mengatasi secara mandiri berbagai persoalan pembangunan di desa yang ide-ide dan upayanya datang baik dari masyarakat maupun pemerintah desa.

Walaupun demikian, pengelolaan Dana Desa mengalami permasalahan, yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat mengenai acuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa sehingga pemerintah desa sulit menentukan besaran anggaran yang digunakan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang tiap tahunnya berubah menjadi kendala bagi desa dalam menyusun rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan yang dibuat dalam APBDesa yang tidak tepat waktu berdampak pada pencairan dana dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

2.7. Konsep Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup (*Going concern*) merupakan salah satu tujuan jangka panjang suatu entitas bisnis yang notabeneanya adalah *profit oriented*. Kelangsungan hidup ini sering dijadikan tolok ukur kinerja manajemen dalam keberhasilan mencapai tujuan perusahaan dan hal ini banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik dari internal maupun eksternal. Ketika kondisi ekonomi yang merupakan faktor eksternal dianggap tidak stabil, maka para investor kemudian mengandalkan peran auditor dalam upaya memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi perusahaan yang diukur melalui opini atas laporan keuangannya.

Pada prinsipnya, permasalahan mengenai *going concern* adalah hal yang kompleks dan secara berkesinambungan akan terus ada. Berdasarkan hal yang demikian, maka perlu adanya tolok ukur yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan status *going concern* atas suatu entitas bisnis. Tolok ukur tersebut seharusnya diuji sehingga hasilnya dapat menjadi indikator acuan dalam perumusan opini audit *going concern*. Di Indonesia, prediksi kebangkrutan akibat kesulitan keuangan masih jarang dilakukan, oleh karena itu perlu dicari tentang model petunjuk adanya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan mungkin mengalami kebangkrutan.³⁵

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masa covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya di bidang perekonomian agar permasalahan pandemi covid-19 ini tidak mengakibatkan resesi ekonomi yang berkepanjangan. Perusahaan besar, menengah, dan kecil yang masih mampu bertahan melakukan beberapa langkah konkrit agar hasil produksinya tetap dapat dipasarkan.

Ada dua kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, yaitu kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Sedangkan

³⁵ Al Rasyid, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, (Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 4.

kebijakan moneter adalah, kebijakan yang dibuat oleh bank sentral (Bank Indonesia), agar stabilitas uang dapat terjaga.³⁶

Dalam menangani pandemi Covid ini pemerintah harus bekerja keras untuk mencetuskan berbagai paket kebijakan, baik dalam hal kebijakan pencegahan penyebaran pandemic Covid, maupun kebijakan dalam hal peningkatan kegiatan ekonomi.. Stimulus kebijakan fiskal juga menjadi yang paling utama dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini terhadap kegiatan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak paling besar.

2.8. Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.³⁷

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti

³⁶ SukirnoSadono,*Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

³⁷ Diah Handayani, Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, hlm. 77-79.

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.³⁸

Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang

³⁸Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020), hlm. 11-12.

Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Provinsi yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten(Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta).

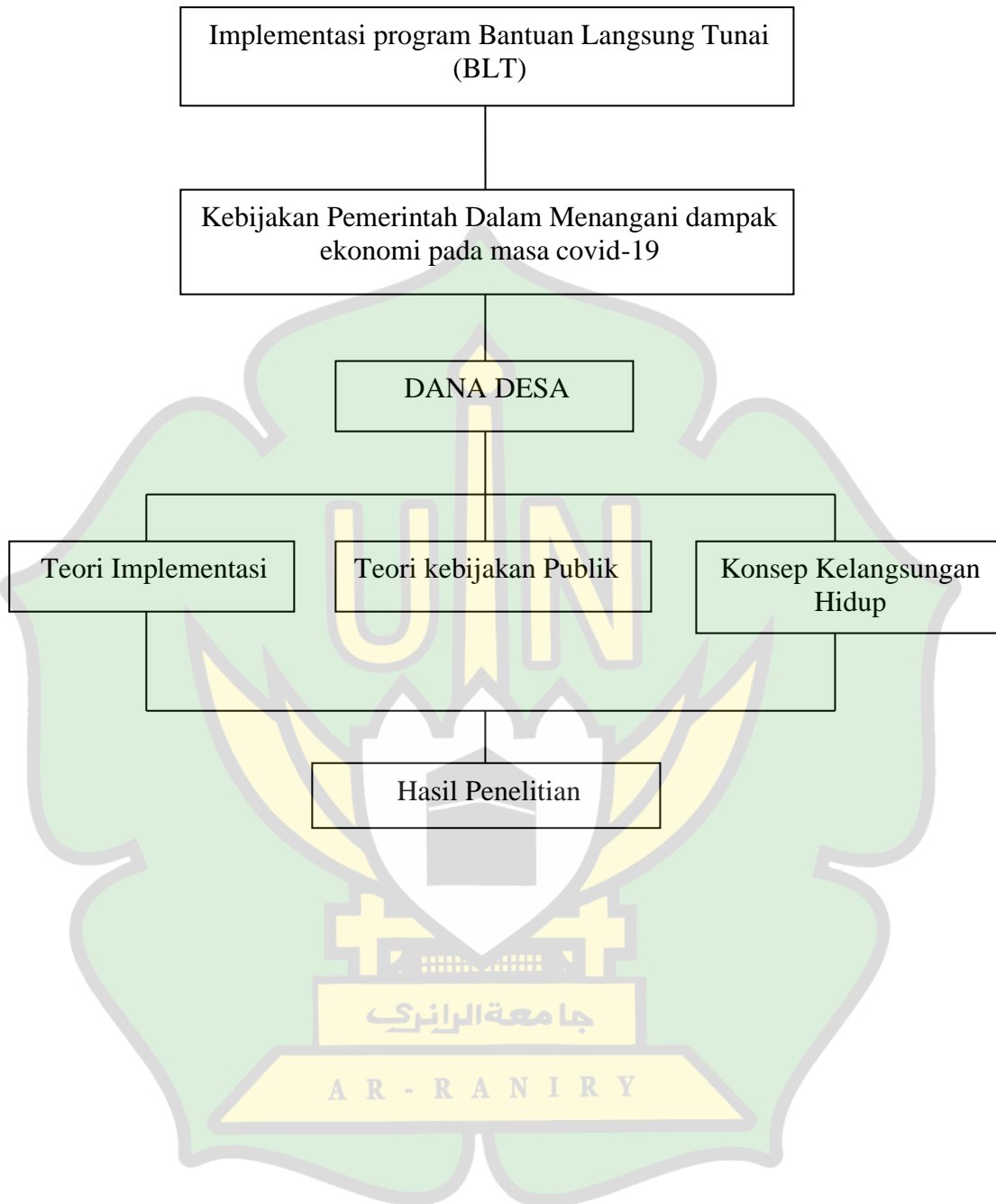
Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur

menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

2.9. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Kantor Keuchik Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan untuk mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa covid-19, dimana dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, seperti penyaluran BLT salah sasaran, adanya data ganda maupun adanya warga yang tidak mendapatkan BLT namun secara ekonomi mereka seharusnya menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti akan menganalisis secara umum terkait dengan apa yang sedang dikaji. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, Penulis akan menjelaskan mengenai implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa covid-19 di Gampong Indra Damai yang dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Sejarah Berdiri Gampong

Masyarakat Gampong Indra Damai awalnya berasal dari Bangsa Aceh, yaitu Kuala Ba'u yang datang dengan tujuan bertani atau bercocok tanam. Lama kelamaan mereka membuat gampong yaitu Gampong sennebok Kubang Gajah, Gampong Suaq Panyang dan Gampong Babah Suaq. Pada tahun 1954, terjadilah kesepakatan antara tiga Keuchik untuk menyatukan 3 gampong tersebut menjadi satu, yang akhirnya diberi nama Gampong Indra Damai.

Gampong Indra Damai adalah salah satu gampong yang berada dalam kemukiman utama yang letaknya dikelilingi oleh empat gampong tetangga, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur.
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan.

Gampong Indra Damai Terdiri dari Lima Dusun yaitu, Dusun Suka Makmur, Dusun Suka Jaya, Dusun Suka Damai, Dusun Suka Bumi dan Dusun

Suka Harapan. Mayoritas penduduk Gampong Indra Damai hidup di sekitar pertanian dan perkebunan. Sebagai penduduk Gampong Indra Damai perancangan di luar daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3.2. Sejarah Pemerintahan Gampong

Sejak berdirinya Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan, ada beberapa Keuchik yang telah memimpin gampong ini dari tahun ke tahun. Berikut penulis lampirkan nama-nama Keuchik Gampong Indra Damai.

Tabel 3.1.
Keuchik Gampong Indra Damai dari Masa ke Masa

No	Nama Keuchik	Masa jabatan	Keterangan
1	Baharuddin	1954 - 1978	-
2	Abdullah Umar	1978 - 1979	-
3	Abdullah	1979 - 1989	-
4	Ahmad Sudin	1989 - 1998	-
5	Bahrin	1999 - 2013	-
6	Syamsuar, AR	2013 - 2019	-
7	Darmawi	2019 - Sekarang	-

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Indra Damai, 2023

Tidak hanya itu, penulis juga melampirkan nama-nama Tuha Peut Gampong Indra Damai sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Tuha Peut Gampong Indra Damai dari Masa ke Masa

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Tgk. M. Rus	Ketua	2015 - 2021	-
2	Darmawi	Wakil	2015 - 2019	-
3	Kardiman	Sekretaris	2015 - 2021	
4	Abdul Manaf	Anggota	2015 - 2021	
5	Rohabi	Anggota	2015 - 2021	
6	Pajakir	Anggota	2015 - 2019	
7	Abdurrahman	Anggota	2015 - 2021	
8	Ruslaini	Anggota	2015 - 2021	
9	Nurdewi	Anggota	2015 - 2021	

10	Sarimuddin	Sekretaris	2019 - 2021	
----	------------	------------	-------------	--

3.3. Letak Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Gampong Indra Damai merupakan salah satu dari 17 Gampong di Kecamatan Kluet Selatan dan tergabung di antara 250 gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan. Gampong yang memiliki luas Wilayah 5,900 HA/m². Secara topopografis terletak pada ketinggian 1 sampai 2 meter diatas permukaan air laut.

Sementara itu, jumlah Penduduk Gampong Indra Damai berdasarkan Profil Gampong Tahun 2019 sebesar 1.817 jiwa yang terdiri dari 859 laki-laki dan 845 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah Jiwa	
		2018	2019
1	Suka Makmur	246	246
2	Suka Jaya	310	310
3	Suka Damai	357	357
4	Suka Bumi	364	364
5	Suka Harapan	443	443
Jumlah Total			1658

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Indra Damai, 2023.

Tabel 3.4.
Jumlah Kepala Keluarga

No	Dusun	Tahun	
		2022	2023
1	Dusun Suka Makmur	70	74
2	Dusun Suka Jaya	97	97
3	Dusun Suka Damai	107	107
4	Dusun Suka Bumi	131	131
5	Dusun Suka Harapan	228	232

Tabel 3.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Tahun 2018		Tahun 2019	
		LK	PR	LK	PR
1	Dusun Suka Makmur	120	126	120	126
2	Dusun Suka Jaya	170	140	170	140
3	Dusun Suka Damai	184	173	184	173
4	Dusun Suka Bumi	186	178	186	178
5	Dusun Suka Harapan	249	194	249	194

3.4. Sektor Keagamaan

Agama yang dianut masyarakat Gampong Indra Damai adalah pemeluk agama Islam seratus persen. Agama manusia bisa memperoleh kepuasan rohani dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan. Di samping itu agama juga mengatur hubungan dengan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (sosial) atau (*hablum minannas*) dan dengan makhluk lain di alam ghaib dan nyata.

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang pencipta Allah SWT, begitu juga masyarakat Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat di Gampong Indra Damai mempunyai kepercayaan yang sama maka masyarakat hidup rukun, saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lainnya dan jarang terjadi gesekan masalah SARA antar masyarakat.

Masyarakat Gampong Indra Damai mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana peribadatan yang ada di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan.

3.5. Sektor Sosial dan Ekonomi

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan, sebab masyarakat adalah *zoon politicon* atau masyarakat sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup, akan tetapi pada interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan ke hal-hal yang negatif pula. Sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan.

Keadaan Sosial masyarakat Gampong Indra Damai sangat kompak dalam berinteraksi sesama masyarakat. Untuk kondisi sosial tentang masalah pendidikan yaitu untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai kondisi sosial utama yang politisi pertimbangkan. Demikian pula, sebuah komunitas perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung fasilitas medis yang berkualitas dan penyedia layanan kesehatan.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat Gampong Indra Damai sebagian besar masih berada dibawah garis kesejahteraan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Pendapatan masyarakat, berkisar antara 500.000 dengan jumlah anggota keluarga sekitar 4-5 orang per kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan pedagang. Rata-rata tingkat pendapatan masyarakat Gampong Indra Damai dikategorikan cukup, dan kondisi kesehatan Masyarakat masih tergolong baik hal ini dapat dilihat dari tindakan kepala keluarga

terhadap anggota keluarganya yang sakit dengan membawanya ke dokter/puskesmas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak pandemi Covid-19 muncul di Indonesia yang berdampak hingga ke desa sekalipun, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengupayakan berbagai bentuk bantuan dan disalurkan dengan baik kepada masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan. Bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah tentunya sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bantuan yang berbentuk tunai yang penyalurannya diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima bantuan dari Pemerintah yang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Gampong Indra Damai merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh selatan yang juga terdampak Covid-19 yang berdampak banyak sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat sekalipun. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa program BLT ini berturut-turut disalurkan kepada masyarakat dari tahun 2020 sebanyak 129 orang, 2021 sebanyak 133 orang, 2022 sebanyak 117 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 56 orang. Berikut uraian tentang implementasi program BLT di Gampong Indra Damai.

4.1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang berupa kompensasi jangka pendek yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan agar dapat membantu masyarakat yang termasuk kategori rumah tangga kurang mampu/miskin yang terdampak Covid-19 untuk dapat menjamin kelangsungan hidup mereka.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sendiri disalurkan berupa uang tunai kepada setiap rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat yang dibagikan dalam kurun waktu pertiga bulan dengan besaran Rp 600.000, dan bulan selanjutnya Rp 300.000. BLT ini sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, serta untuk mencegah terjadinya penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin akibat adanya kesulitan di bidang ekonomi.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Indra Damai menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 juga ikut memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di Gampong tersebut, dan dampak yang paling terlihat yaitu di bidang ekonomi. Adanya penerapan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah membuat ruang gerak masyarakat dalam mencari penghasilan. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah agar masyarakat terdampak bisa terus memenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa menjamin kelangsungan hidup mereka yang salah satunya adalah dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai.

“Ya memang sekarang hampir disemua daerah itu terdampak Covid-19, di gampong Indra Damai ini juga terdampak. Apalagi setelah dilakukan himbauan untuk menerapkan PSBB, otomatis ruang gerak masyarakat juga ikut terbatas dalam mencari penghasilan, terutama masyarakat yang mencari nafkah dengan cara bertani, berdagang. Jadi ya salah satu cara agar masyarakat ini bisa melanjutkan hidupnya dengan cara Pemerintah kita memberikan bantuan berupa program Bantuan Langsung Tunai ini”.³⁹

Selanjutnya beliau juga menyampaikan dalam wawancaranya bersama Peneliti bahwa pada dasarnya implementasi peyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) dilakukan oleh Pemerintah Gampong melalui 2 (dua) metode, yaitu dengan metode nonn tunai (*cash less*) setiap bulan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong. Selanjutnya penyaluran tersebut juga dapat dilakukan dengan cara memberikan langsung uang tersebut secara tunai kepada masyarakat penerima manfaat yang bertempat di Kantor Desa/Keuchik dengan catatan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam penyaluran BLT di Gampong Indra Damai dilakukan secara tunai atau memberikan langsung bantuan berupa uang tunai tersebut kepada masyarakat penerima manfaat dengan tujuan agar lebih memudahkan masyarakat penerima manfaat, dan untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya seperti adanya pemotongan jumlah dana yang diterima oleh oknum tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

“Betul, untuk penyaluran dana BLT ini dilakukan sendiri oleh Pemerintah Gampong Indra Damai. Ketika menyalurkan itu kita sebenarnya ada 2 cara, yaitu secara tunai dan non tunai. Tapi Pemerintah Gampong Indra Damai memilih untuk menyalurkan bantuan BLT ini secara tunai, karena kami takut jika dilakukan secara non tunai/dititipkan ke rekening yang kami tunjuk tidak semuanya amanah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak

³⁹ Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai pada tanggal 15 Mei 2023.

diinginkan tersebut lebih baik dilakukan secara langsung tunai saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku”.⁴⁰

Dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai ini Sekretaris Gampong dalam wawancaranya bersama Peneliti juga menyatakan hal serupa, bahwa penyaluran BLT di Gampong Indra Damai dilakukan secara tunai kepada masyarakat penerima agar lebih memudahkan masyarakat. Karena masyarakat tidak perlu lagi terlibat dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong, mengingat tidak semua masyarakat Gampong memiliki rekening bank pribadi dan juga jarak dari Gampong menuju atm atau bank lumayan jauh.

“Iya betul, dalam menyalurkan BLT ini kami Pemerintah Gampong melakukannya secara langsung dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat penerima manfaat. Alasannya ya karena itu lebih memudahkan masyarakat, karena tidak semuanya punya rekening bank sendiri. Terlebih lagi jarak dari Gampong menuju atm atau bank terdekat cukup jauh. Jadi untuk lebih memudahkan masyarakat kami dari Pemerintah Gampong menyalurkannya secara tunai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke bank atau terlibat dengan pihak ketiga yang diberi amanah untuk menipkan uang bantuan itu”.⁴¹

Berdasarkan wawancara bersama keuchik Gampong Indra Damai, dalam proses implementasi penyaluran dana BLT tersebut ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, mulai dari pendataan, pemutakhiran data penerima BLT hingga penyaluran dana BLT. (1) Pendataan; pendataan penerima bantuan dana BLT ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data masyarakat kurang mampu/miskin yang telah melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan dana BLT dari

⁴⁰ Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai pada tanggal 15 Mei 2023.

⁴¹ Wawancara Peneliti bersama Sekretaris Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

pemerintah. (2) Pemutakhiran data penerima BLT dilakukan dengan memeriksa kembali data yang sudah ada apakah sudah valid atau belum. Selanjutnya nama-nama yang ada dalam penerima bantuan BLT juga diperiksa kembali apakah sudah pernah menerima bantuan lain dari pemerintah atau belum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara data penerima bantuan BLT dengan penerima bantuan lainnya yang serupa. (3) Penyaluran dana BLT yang diserahkan kepada masyarakat berupa uang tunai senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga kurang mampu/miskin yang dari segi ekonomi terdampak covid-19.

“untuk prosesnya itu dalam penyaluran BLT itu kita mulai pertama sekali dari proses pendataan penerima BLT, masyarakat yang kurang mampi yang memenuhi kriteria kita masukkan ke data penerima BLT ini. Kedua kita lakukan pemutakhiran data, kita cek lagi apakah nama-nama tadi sudah pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah sebelumnya atau tidak, supaya tidak tumpang tindih datanya dan dana BLT itu tepat sasaran. Ketiga baru kita salurkan dana BLT tersebut kepada masyarakat penerima BLT berupa uang tunai sejumlah Rp 600.000 rupiah/KK”.⁴²

Tabel 4.1. Jumlah KPM BLT Gampong Indra Damai

No.	Tahun	Jumlah KPM BLT
1.	2021	133
2.	2022	117
3.	2023	56

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat Gampong Indra Damai selaku pihak yang mengawasi kinerja Aparatur Gampong untuk memastikan kesesuaian tentang bagaimana implementasi program

⁴² Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai pada tanggal 15 Mei 2023.

Bantuan Langsung Tunai di Gampong Indra Damai berdasarkan ketetapan yang ada.

Dalam wawancara bersama Tuha Peut Gampong Indra Damai menyatakan bahwa sampai saat ini Aparatur Gampong dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai sudah sangat baik dan sesuai dengan ketetapan yang ada. Program bantuan yang diberikan pertiga bulan kepada masyarakat sudah dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada 2020 hingga pada tahun 2023 ini. Selain itu Tuha Peut Gampong Indra Damai juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengamatannya masyarakat yang menerima bantuan BLT sejauh ini memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut dan sudah memenuhi kriteria penerima manfaat.

“Dari yang saya amti dan saya ketahui, Alhamdulillah Aparatur Gampong Indra Damai dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ini sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Bantuan Langsung Tunai ini juga diberikan kepada masyarakat dari tahun 2020 hingga saat ini juga masih ada yang menerima Bantuan Langsung Tunai itu. Selain itu juga saya melihat bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan, yang sudah memenuhi kriteria bahwa dia berhak menerima bantuan dari pemerintah”.⁴³

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan taraf hidup dan kemampuan daya beli masyarakat. Namun program tersebut membawa manfaat dan angkat membantu bagi masyarakat terdampak covid-19.

Dalam wawancara peneliti bersama salah satu masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) beliau menyampaikan bahwa adanya program BLT dari Pemerintah sangat membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan dasar, terlebih lagi beliau yang sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti cukup

⁴³ Wawancara Peneliti bersama Tokoh Masyarakat (Tuha Peut) Gampong Indra Damai, pada tanggal 16 Mei 2023.

mengalami kesulitan dengan terjadinya kenaikan harga barang pasca Covid-19. Beliau menyatakan bahwa sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut, karena program tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi beliau.

“Saya sangat bersyukur nak karena saya diberi Bantuan Langsung Tunai ini oleh pemerintah. Karena adanya bantuan ini saya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan saya. Apalagi selama covid-19 ini harga barang banyak yang naik seperti minyak goreng, telur, dan lainnya. Alhamdulillah saya menjadi salah satu penerima bantuan ini, kalau tidak saya pasti sudah bingung mau bagaimana membeli kebutuhan dengan penghasilan yang kurang selama covid-19 ini”.⁴⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya dalam wawancaranya bersama Peneliti. Beliau menuturkan bahwa merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut kepada masyarakat terdampak yang ada di Gampong Indra Damai. Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu dirinya dan masyarakat lainnya dalam memenuhi kebutuhan mereka.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih dek sama pemerintah karena sudah memberikan bantuan BLT ini. Bantuan ini sangat bermanfaat dan membantu bagi kami masyarakat Gampong Indra Damai yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena selama pandemi ini rata-rata masyarakat merasa kesulitan dibidang ekonomi”.⁴⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya.

⁴⁴ Wawancara Peneliti bersama Penerima BLT (Masyarakat 1) Gampong Indra Damai, pada tanggal 16 Mei 2023.

⁴⁵ Wawancara Peneliti bersama Penerima BLT (Masyarakat 2) Gampong Indra Damai, pada tanggal 17 Mei 2023.

“Iya benar, saya merupakan penerima bantuan BLT. Saya pribadi sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah ini. Disini masyarakat yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan, dan sebagai penerima bantuan saya sangat bersyukur karena sudah sedikit diringankan beban saya. Karena jujur saya awalnya sempat bingung tiba-tiba ada pandemi covid-19 karena selama ini tidak pernah terjadi. Tapi Alhamdulillah saya menerima bantuan ini, jadi saya merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implentasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Gampong Indra Damai. Disisi lain, masyarakat kurang mampu selaku pihak yang menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut dari Pemerintah.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangung hidup masyarakat di Gampong Indra Damai pada masa Covid-19

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan dikeluarkannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menghadapi berbagai faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat kesuksesan penyalurannya. Berikut uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat penyaluran BLT di Gampong Indra Damai.

4.2.1. Faktor Pendukung

1. Komunikasi Yang Baik Antara Pemerintah Gampong

Komunikasi yang baik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Indra Damai. Melalui komunikasi kita dapat berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu Pemerintah Gampong selaku internal organisasi, dan masyarakat selaku eksternal organisasi.

Dengan adanya komunikasi antar Aparatur Gampong yang baik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama yang baik pula agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai dapat berjalan dengan sukses.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Indra Damai menyatakan bahwa Pemerintah Gampong Indra Damai sudah menjalin komunikasi yang sangat baik baik antar Aparatur Gampong maupun dengan masyarakat dalam proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Pemerintah Gampong dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tanpa ada

kendala dari segi komunikasi baik antar Aparatur maupun dengan masyarakat Gampong.

“Untuk komunikasi Alhamdulillah semuanya berjalan sangat baik. Dari aparaturnya komunikasi lancar, begitu juga dengan masyarakat gampong. Dalam proses penyaluran program BLT ini kami dari Pemerintah Gampong sama sekali tidak mengalami kendala dari segi komunikasi, dan itu sangat mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program BLT ini”.⁴⁶

Selanjutnya beliau juga menuturkan bahwa dengan adanya jalinan komunikasi yang baik juga tercipta karena adanya komitmen Pemerintah Gampong untuk menyalurkan BLT, serta pemahaman serta pemberian tugas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan adanya penyampaian informasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, sehingga harapannya pelaksanaan program BLT tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Ya tentunya komunikasi yang baik dalam internal maupun eksternal Pemerintahan Gampong ini juga didukung dengan adanya komitmen dari pihak Pemerintah Gampong untuk menyalurkan BLT, serta pemahaman pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab. Selain itu informasi yang sesuai yang disampaikan oleh setiap pihak yang dilibatkan dalam proses penyaluran ini juga sangat mendukung terciptanya komunikasi yang baik, sehingga kedepannya program BLT ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara Pemerintahan supra Gampong sudah berjalan

⁴⁶ Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

⁴⁷ Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

dengan sangat baik dengan didukung oleh adanya komitmen, pemahaman serta penyampaian informasi yang sesuai dari setiap pihak yang terlibat dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai.

2. Sumber Daya Yang Memadai

Sumber daya yang memadai sendiri terdiri dari Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Sumber Daya Informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dari penyaluran program BLT, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang ikut menunjang keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam menyelesaikan pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena SDM merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tentunya SDM harus memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai tentang kegiatan tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor pertama dan utama dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika dalam sebuah Pemerintahan Gampong sudah memiliki modal besar, teknologi yang canggih dan sumber daya alam yang melimpah, jika Sumber Daya Manusia-nya tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka keberhasilan dalam pelaksanaan program tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya

aparatur yang benar-benar berkualitas yang mengerti dan memahami tentang proses dan tahapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

Dalam wawancara peneliti bersama Sekretaris Gampong Indra Damai, beliau menyebutkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Indra Damai setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut sudah terlebih dahulu diberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT), jadi untuk SDM dari Aparatur Gampong sudah memadai untuk melaksanakan penyaluran BLT tersebut”.⁴⁸

Selanjutnya terkait dengan sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya informasi dan wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang ikut menunjang keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Indra Damai yang menyatakan bahwa hal tersebut juga sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang baik karena adanya penyampaian informasi yang sesuai dan komitmen dari Aparatur Gampong dalam Menyalurkan BLT karena memiliki rasa tanggung jawab akan wewenang dan tugas yang diberikan.

“Untuk sumber daya sendiri sudah memadai, baik dari segi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informasi dan yang lainnya. Dalam proses penyaluran BLT Pemerintah Gampong sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk menyalurkan BLT tersebut kepada masyarakat karena memiliki rasa tanggung jawab atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk informasi sendiri juga sudah sangat memadai. Alhamdulillah kalau dari segi informasi, semua yang kita terima terima

⁴⁸ Wawancara Peneliti bersama Sekretaris Gmpong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

sudah sesuai dan komunikasi antar Pemerintah Gampong dengan masyarakat juga terjalin dengan baik”.⁴⁹

Dari hasil penelitian dan wawancara terkait faktor pendukung penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai adalah karena adanya komunikasi yang baik antara Pemerintahan supra Desa dan juga Sumber Daya yang memadai dalam proses penyaluran BLT tersebut, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informasi, serta wewenang serta rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai bentuk kesadaran dan komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak pelaksana penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai.

4.2.2. Faktor Penghambat

1. Tumpang Tindihnya Data Penerima BLT dengan Bantuan Sosial Lain

Adanya tumpang tindih data masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan bantuan sosial lain menghambat penyaluran BLT karena hal ini mengharuskan Pemerintah Gampong untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan pembuatan dokumen ulang agar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima manfaat BLT.

⁴⁹ Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

Berdasarkan wawancara bersama Keuchik Gampong Indra Damai menyatakan bahwa memang benar adanya tumpang tindih data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan bantuan sosial lainnya. Hal ini menyebabkan Aparatur Gampong Indra Damai harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan kembali data yang ada agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dan tidak menerima bantuan sosial lain selama pandemi Covid-19.

“Data yang double ini juga jadi permasalahan bagi Pemerintah Gampong, karena Pemerintah Gampong harus bekerja 2 (dua) kali untuk menyusun dan menyesuaikan lagi data-data yang ada supaya tidak double. Ini juga jadi memperlambat kinerja kita, karena memakan waktu lebih. Tapi hal itu harus dilakukan supaya tidak ada BLT yang tidak tepat sasaran. Semua harus tepat sasaran dan betul-betul masyarakat yang membutuhkan yang menerima bantuan tersebut”.⁵⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Indra Damai dalam wawancaranya bersama peneliti yang menyatakan bahwa:

“Iya, memang benar ada data yang tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lainnya. Makanya Pemerintah Gampong harus memeriksa ulang lagi data-data yang ada. Jika sudah sesuai dan tidak ada lagi yang double, baru kita gunakan sebagai data penerima manfaat BLT, karena sasarannya masyarakat yang benar-benar butuh untuk dibantu. Dari Pemerintah Gampong sendiri tidak mau jika penerima bantuan BLT ini orang yang tidak benar-benar membutuhkan atau selama pandemi dia sudah menerima bantuan sosial yang lain, jadi kasihan yang benar membutuhkan kalau tidak dapat jika ada data yang double”.⁵¹

Dalam hal ini, tidak dipungkiri bahwa terdapat masyarakat yang tidak terima akan keputusan Keuchik dan Pemerintah Gampong untuk mengalihkan

⁵⁰ Wawancara Peneliti Bersama Keuchik Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara Peneliti bersama Sekretaris Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya dengan calon penerima manfaat yang baru. Menurut Keuchik Gampong Indra Damai hal yang umum terjadi di Gampong terkait daftar nama penerima BLT yang menurut mereka tidak berhak.

“Masyarakat yang merasa tidak terima itu pasti ada, apalagi sebelumnya namanya ada di daftar, tapi tiba-tiba karena datanya double kita alihkan ke orang lain, itu pasti ada protes. Akan tetapi, dari pihak Pemerintah Gampong sendiri selaku pihak penyalur bantuan ini berusaha memberikan pengertian dan pemahaman secara baik kepada masyarakat tersebut. Bahwa penerima BLT ini benar-benar orang yang membutuhkan bantuan dan belum pernah menerima bantuan sejenisnya selama pandemi Covid-19 ini”.⁵²

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pertama yang ditemukan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai yaitu terkait tumpang tindihnya data penerima BLT dengan bantuan sosial yang lain. Sehingga Pemerintah Gampong harus menyusun ulang kembali data yang ada agar sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan.

2. Adanya Masyarakat Yang Masih Belum Memiliki NIK

Salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meskipun bagi masyarakat yang memenuhi kategori rumah tangga kurang mampu/miskin di Gampong yang belum memiliki NIK tetap menjadi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerintah Gampong harus tetap berupaya lebih agar dapat mengarahkan masyarakat yang

⁵² Wawancara Peneliti bersama Keuchik Gampong Indra Damai, pada tanggal 15 Mei 2023.

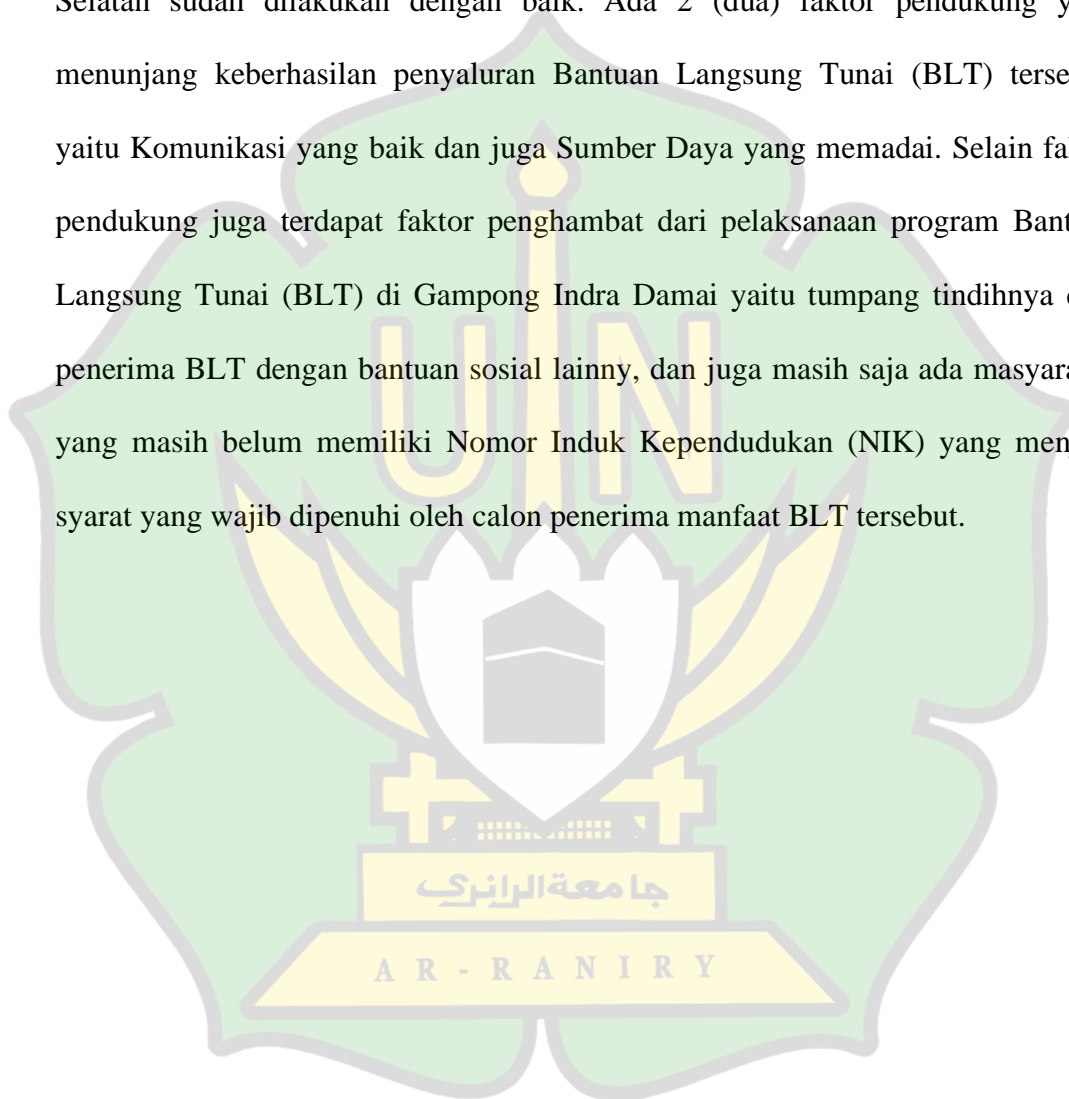
tidak memiliki NIK untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu ke kantor Disdukcapil. Sehingga hal tersebut membutuhkan waktu dan menjadi salah satu faktor penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal tersebut dibenarkan oleh Keuchik Gampong Indra Damai dalam wawancaranya bersama peneliti yang menuturkan bahwa masih ada masyarakat yang masih belum memiliki NIK pada saat pendataan calon penerima manfaat BLT. Sehingga Pemerintah Gampong Indra Damai harus terlebih dahulu mengarahkan masyarakat tersebut untuk membuat KTP ke Disdukcapil dan membutuhkan waktu lebih. Sehingga hal ini termasuk sebagai salah satu aspek yang menghambat kinerja Pemerintah Gampong dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai.

“Pada saat pendataan calon penerima BLT itu ada 2 (dua) orang dari masyarakat kita yang masih belum punya NIK. Padahal salah satu persyaratan untuk bisa menerima bantuan BLT ini harus punya NIK, jadi kalau belum punya kan dari Pemerintah Gampong harus mengarahkan dulu supaya orang ini buat KTP ke Disdukcapil. Itu juga sudah memakan waktu, sehingga proses penyaluran ini jadi terhambat”.

Sudah sepatutnya Pemerintah Gampong memastikan bahwa seluruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut benar-benar memenuhi syarat agar tidak terjadi permasalahan kedepannya. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam hal ini juga sudah sangat baik dengan mengarahkan masyarakat yang belum memiliki NIK tersebut membuat KTP terlebih dahulu agar memudahkan proses pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sudah dilakukan dengan baik. Ada 2 (dua) faktor pendukung yang menunjang keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, yaitu Komunikasi yang baik dan juga Sumber Daya yang memadai. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Indra Damai yaitu tumpang tindihnya data penerima BLT dengan bantuan sosial lainnya, dan juga masih saja ada masyarakat yang masih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh calon penerima manfaat BLT tersebut.





BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan data dan pembahasan yang ada maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Gampong Indra Damai. Hal tersebut terlihat dari penerima manfaat BLT yang sudah tepat sasaran dan proses penyaluran bantuan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Disisi lain, masyarakat kurang mampu selaku pihak yang menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun dampaknya tidak terlihat secara signifikan.
2. Dalam pelaksanaannya, implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Gampong Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten

Aceh Selatan memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi program BLT tersebut adalah *pertama* adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Supra Gampong dan *kedua*, Sumber Daya yang memadai dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan faktor penghambat juga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama* adanya tumpang tindih data penerima BLT dengan bantuan sosial lainnya, dan *kedua*, Masih ada masyarakat yang masih belum memiliki NIK yang menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

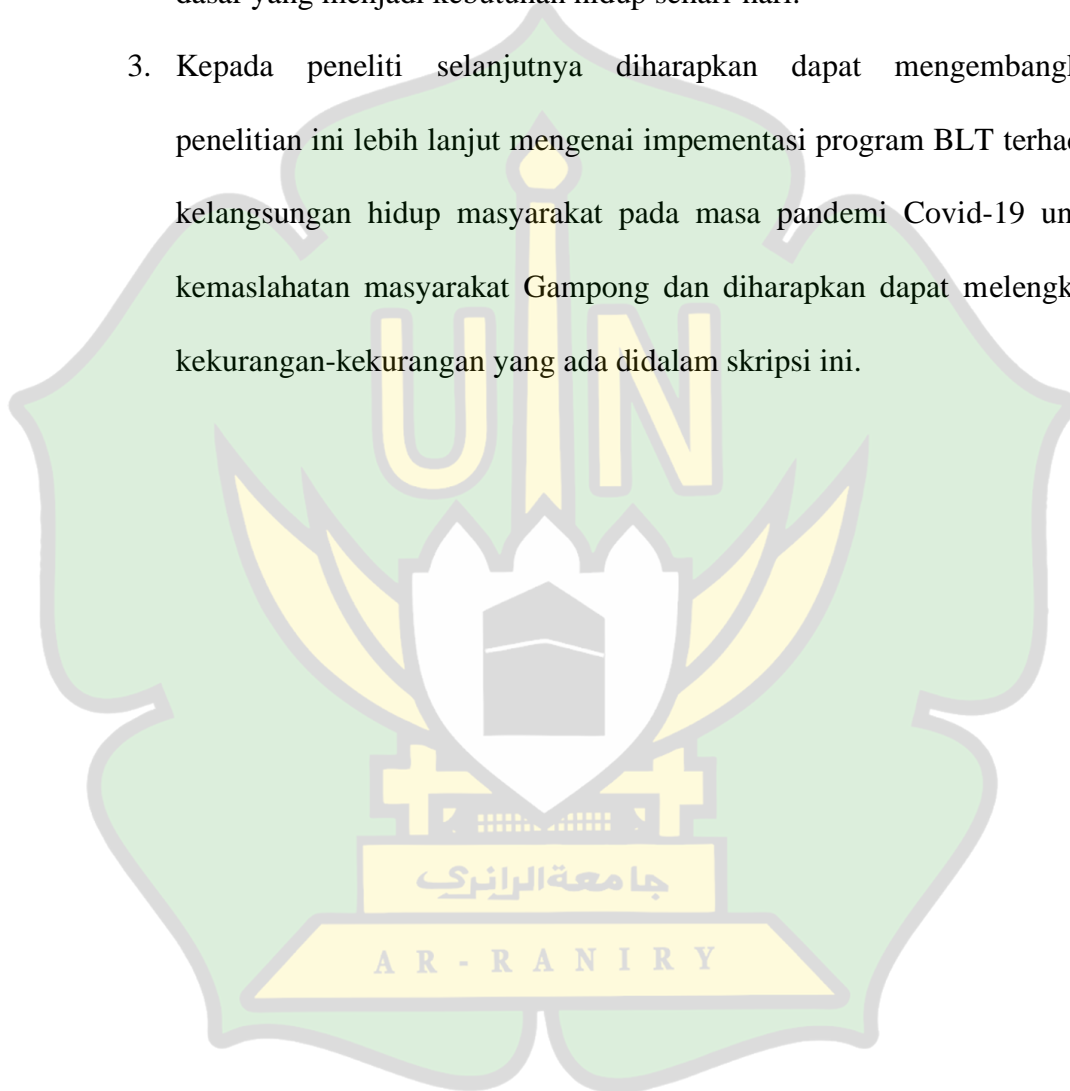
5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Gampong Indra Damai, sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Indra Damai masih perlu melakukan koreksi pada saat pemutakhiran data terpadu sebagai dasar untuk menetapkan calon penerima manfaat Bantuan Tunai Langsung (BLT), sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih data calon penerima BLT dengan data bantuan sosial lainnya agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran seperti yang diharapkan.
2. Kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disalurkan oleh Pemerintah Gampong untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari agar

dampak dari pemberian BLT tersebut dapat terlihat. Selain itu bantuan yang diberikan tersebut juga diharapkan agar dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, bukan untuk hal lain diluar kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut mengenai impementasi program BLT terhadap kelangsungan hidup masyarakat pada masa pandemi Covid-19 untuk kemaslahatan masyarakat Gampong dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada didalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Agustina, Ika dan Hendra, Asep. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8, No. 2, Desember 2021. 132-144.

Al Rasyid, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, (Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008).

Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, hlm. 77-79.

Diana Nabillah Putri. 2022. *Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nurul Latifah. 2021. *Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap pelaku usaha kecil menengah pada masa Covid-19 di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar*. Program Studi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Putri Windarti, *Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muara Jalai*, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

Buku:

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta: MediaPressindo, 2007).

Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, (New York: Knopf, 1953).

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, (New Haven: Yale University Press, 1970).

Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

I Nyoman Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005).

John W. Best, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Terj. Sampai Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso), (Surabaya: Nasional, 1992).

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020).

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2018).

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

SukirnoSadono, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung Alfabeta, 2010).

Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syaukani, dkk., *Otonomi Dalam Kesatuan*, (Yogyakarta: Yogya Pustaka, 2004).

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006).

Media Online:

Intan Rakhmayanti Dewi, 2 Tahun Jadi Misteri, Inikah Asal Mula Covid yang Sebenarnya?. Diakses melalui situs: <https://www.cnbcindonesia.com/> pada tanggal 6 April 2023.

Kementerian Keuangan RI, Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

Kementerian Sosial RI, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Diakses melalui situs: <https://kemensos.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

Kementerian Keuangan RI, Sekilas Pandang Mengenai Virus Baru, Covid-19. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 6 April 2023.

Nur Fitriatus Shalihah, Hari Ini dalam Sejarah: WHO Resmi Menamai Penyakit Covid-19. Diakses melalui situs: baca: <https://www.kompas.com/pada> tanggal 6 April 2023.

